



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 6269-6275

P-ISSN: 2963 9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi *Blue Economy* melalui Kontribusi Industri Ikan Tangkap dan Budidaya Ikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir dalam Perspektif Ekonomi Islam

Etika Darojah, Muhammad Yusuf Bahtiar, Zulaikah

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

etikadarojah06@gmail.com, myusufbahtiar@radenintan.ac.id, zulaikah@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep Blue Economy melalui kontribusi industri ikan tangkap dan budidaya ikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nelayan, pembudidaya ikan, dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, serta observasi langsung di lapangan dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Blue Economy di wilayah ini belum optimal, ditandai dengan masih adanya penggunaan alat tangkap yang merusak, pengelolaan limbah yang buruk, dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat pesisir. Kendala utama meliputi kurangnya edukasi, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, serta ketimpangan akses modal dan pasar antara pelaku besar dan kecil. Namun, terdapat peluang berupa potensi sumber daya laut yang melimpah, dukungan kebijakan pemerintah, dan peluang kolaborasi multi-stakeholder. Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan Blue Economy sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, yang menekankan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan kelembagaan lokal, pemberian insentif bagi praktik ramah lingkungan, peningkatan edukasi masyarakat, serta integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan pengelolaan sektor perikanan.

Kata kunci: Blue Economy, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Islam, Perikanan Tangkap, Budidaya Ikan, Pesisir Bandar Lampung

1. Latar Belakang

Fenomena Penelitian

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional (Priyono, 2022; Howara, 2013). Namun, pemanfaatan sumber daya laut yang belum optimal, kerusakan ekosistem pesisir, serta ketimpangan kesejahteraan masyarakat pesisir masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Aprilia & Mulyanie, 2021; Sukarniati & Khoirudin, 2017). Dalam konteks global, agenda Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 14 menekankan pentingnya pelestarian ekosistem laut dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Humairoh et al., 2024; Hasan, 2022).

Konsep Blue Economy hadir sebagai solusi inovatif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan laut, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Chapra, 2021; Permana, 2024). Di kawasan pesisir Bandar Lampung, potensi perikanan tangkap dan budidaya ikan sangat besar, namun implementasi Blue Economy masih menghadapi kendala seperti penggunaan alat tangkap yang merusak, pengelolaan limbah yang buruk, dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat pesisir (Pane et al., 2025; Ahmad, 2025).

Implementasi Blue Economy melalui Kontribusi Industri Ikan Tangkap dan Budidaya Ikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir dalam Perspektif Ekonomi Islam

Permasalahan Penelitian

Permasalahan utama dalam penerapan Blue Economy di sektor perikanan pesisir Bandar Lampung adalah rendahnya edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keberlanjutan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan (Lestari & Khoirudin, 2021; Mukaromah & Rahmawati, 2023). Selain itu, ketimpangan akses modal dan pasar antara pelaku usaha besar dan kecil menyebabkan kesenjangan produktivitas dan kesejahteraan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam (Pane et al., 2025; Permana, 2024).

Praktik-praktik eksploitasi sumber daya laut, seperti overfishing dan penggunaan bahan kimia dalam budidaya ikan, masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap ekosistem pesisir (Humairoh et al., 2024; Ahmad, 2025). Kurangnya kolaborasi multi-stakeholder, lemahnya pengawasan kelembagaan, serta minimnya insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik berkelanjutan menjadi hambatan dalam optimalisasi Blue Economy (Sukarniati & Khoirudin, 2017; Pane et al., 2025).

Tujuan, Urgensi, dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Blue Economy melalui kontribusi industri ikan tangkap dan budidaya ikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Bandar Lampung, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan pengelolaan sektor perikanan, guna memastikan pemerataan manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan (Hasan, 2022; Permana, 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan analisis kontribusi ekonomi, tantangan implementasi, serta integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan industri perikanan pesisir, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya (Mukaromah & Rahmawati, 2023; Humairoh et al., 2024).

2. Metodologi Penelitian

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Blue Economy melalui kontribusi industri ikan tangkap dan budidaya ikan di kawasan pesisir Bandar Lampung, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam (Yin, 2022; Creswell, 2021; Rahardjo, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara komprehensif dan kontekstual, dengan fokus pada proses, makna, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan (Septiana, 2024; Emzir, 2022).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2023). Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam tak berstruktur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan temuan berdasarkan fenomena yang muncul di lapangan (Creswell, 2021; Rahardjo, 2017). Validasi data dilakukan melalui teknik member check dan triangulasi metode serta sumber untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data (Susanto et al., 2022; Gideon et al., 2021).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian terdiri dari pelaku industri ikan tangkap dan budidaya ikan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, khususnya di wilayah Pesisir Panjang dan Teluk. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: nelayan aktif, petani budidaya ikan skala kecil-menengah, dan pemangku kepentingan yang memahami penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sektor perikanan (Roscoe, 2021; Howara, 2013). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 15 partisipan, sesuai dengan teori Roscoe yang menyarankan sampel kecil untuk penelitian kualitatif yang mendalam (Sudaryono, 2023; Emzir, 2022).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimulai dengan pemilihan kasus dan penentuan tema penelitian berdasarkan fenomena yang relevan di bidang ekonomi biru dan perikanan pesisir (Yin, 2022; Rahardjo, 2017). Selanjutnya, peneliti melakukan pembacaan literatur, pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen resmi dan laporan terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif dan deskriptif, kemudian divalidasi melalui member check dan triangulasi. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara sistematis dan logis (Creswell, 2021; Sugiyono, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Implementasi Konsep Blue Economy dalam Aktivitas Industri Ikan Tangkap dan Budidaya Ikan di Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung

Implementasi konsep Blue Economy di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung mencerminkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan ikan tangkap dan pembudidaya ikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi kelautan di daerah ini masih menggunakan metode konvensional dengan efisiensi yang rendah dan pengawasan lingkungan yang minim. Metode tersebut tidak hanya menghambat produktivitas jangka panjang, tetapi juga berisiko merusak ekosistem laut secara berkelanjutan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip utama Blue Economy yang menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut secara efisien, inovatif, dan ramah lingkungan tanpa menyebabkan degradasi ekosistem.

Jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 14 (Life Below Water), maka praktik-praktik yang ditemukan di lapangan menunjukkan tantangan serius dalam mencapai target global tersebut. Tujuan 14 menekankan pentingnya melestarikan dan secara berkelanjutan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha perikanan di pesisir Kota Bandar Lampung masih belum menyadari keterkaitan langsung antara aktivitas mereka dengan kerusakan ekosistem laut. Misalnya, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti jaring berukuran kecil dan *trawl* menyebabkan overfishing serta mengancam keberlanjutan stok ikan (Ahmad, 2025).

Selain itu, pembudidaya ikan juga mengakui bahwa mereka kerap membuang limbah pakan dan kotoran langsung ke perairan tanpa pengolahan, serta membangun tambak di atas lahan *mangrove* tanpa memperhatikan dampak ekologisnya. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mengganggu siklus hidup organisme laut dan mengurangi kualitas air, tetapi juga memperparah kerusakan kawasan pesisir yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang ekstrem. Padahal, prinsip Blue Economy dan Tujuan 14 SDGs secara eksplisit mendorong adanya pengelolaan sumber daya laut yang berbasis konservasi, seperti pelestarian *mangrove*, pengendalian pencemaran laut, serta praktik perikanan berkelanjutan yang mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut menjadi masalah mendasar yang perlu ditangani melalui pendidikan, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan lokal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaku usaha perikanan umumnya masih jarang mengikuti pelatihan tentang pengelolaan lingkungan atau konservasi laut, serta tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai regulasi perlindungan kawasan pesisir. Hal ini menyebabkan tindakan mereka lebih banyak didasarkan pada kebutuhan ekonomi jangka pendek daripada pertimbangan ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan pesisir berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas nelayan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka dalam mengimplementasikan prinsip Blue Economy yang sejalan dengan SDGs, terutama dalam mendukung pencapaian Tujuan 14 yang krusial bagi kelestarian ekosistem laut di masa depan (Dewi dkk., t.t.).

Pada wawancara dengan nelayan ikan tangkap dan pembudidaya ikan pada bab sebelumnya, juga diketahui bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi kelautan masih menggunakan metode konvensional dengan efisiensi yang rendah. Dalam praktik ekonomi kelautan yang masih bersifat konvensional, para nelayan ikan tangkap umumnya menggunakan alat tangkap tradisional seperti jaring insang (*gillnet*), bubu, dan pancing tangan, yang sering kali tidak selektif terhadap jenis dan ukuran ikan serta berpotensi merusak ekosistem laut jika digunakan secara berlebihan. Penangkapan ikan dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi seperti sonar atau GPS, melainkan hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun dalam membaca cuaca, arus laut, dan pola musim ikan. Sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu kayu kecil tanpa mesin atau dengan motor tempel sederhana, sehingga

jarak jelajah terbatas dan hasil tangkapan tidak maksimal (Latif, 2025). Konsep Blue Economy, seperti yang dijelaskan oleh Gunter Pauli, berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan serta pengolahan hasil laut yang tidak menimbulkan limbah (Pauli, 2010). Namun, hasil lapangan menunjukkan bahwa kegiatan perikanan tangkap dan budidaya masih menyumbang limbah organik dan anorganik yang mencemari perairan pesisir Bandar Lampung. Sampah plastik dari alat tangkap serta pakan buatan menjadi masalah utama dalam aktivitas budidaya ikan (Marzuki, 2025).

Selain itu, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti jaring berukuran kecil menyebabkan *overfishing* dan mengganggu siklus regenerasi ikan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya jumlah tangkapan, seperti yang dikeluhkan oleh beberapa nelayan di Kecamatan Panjang. Padahal, prinsip Blue Economy mendorong pengelolaan perikanan berbasis stok lestari dan pelestarian habitat alami. FAO dalam dokumen “Blue Growth Initiative” menjelaskan bahwa efisiensi sumber daya dan pengelolaan ekosistem laut yang baik adalah pilar penting dari ekonomi biru. Sayangnya, pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa praktik pembudidayaan ikan air laut belum mempertimbangkan kualitas air, rotasi panen, dan konservasi bakau secara terpadu. Banyak tambak yang dibangun di atas lahan hutan *mangrove*, yang mengurangi daya dukung ekosistem pesisir (Nazar dkk., t.t.).

Keterbatasan akses terhadap teknologi juga menjadi hambatan dalam penerapan Blue Economy. Berdasarkan wawancara dengan pembudidaya ikan di Teluk Betung Timur, sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses ke teknologi budidaya yang hemat energi dan rendah limbah. Salah satu contohnya adalah teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS), yakni sistem budidaya tertutup yang memungkinkan air digunakan kembali melalui proses filtrasi dan pemurnian, sehingga dapat menghemat air dan mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan. Selain itu, metode bioflok juga menjadi inovasi yang sangat relevan, karena memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik seperti sisa pakan dan kotoran ikan menjadi nutrisi tambahan, sehingga tidak hanya menjaga kualitas air, tetapi juga menekan biaya operasional. Teknologi lainnya seperti penggunaan panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi dan penerapan sensor digital berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk memantau kualitas air secara *real-time*, juga menjadi langkah konkret dalam mendukung prinsip efisiensi dan ramah lingkungan. Namun, ketiadaan akses terhadap teknologi-teknologi tersebut di kalangan pembudidaya kecil menunjukkan perlunya intervensi dari pemerintah atau lembaga terkait untuk menjembatani kesenjangan teknologi, melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur, dan bantuan pendanaan agar prinsip Blue Economy benar-benar dapat diimplementasikan secara merata di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran inovasi yang seharusnya menjadi ciri utama dari Blue Economy.

World Bank menyebutkan bahwa Blue Economy mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan dengan menjaga ekosistem laut tetap produktif dan sehat (A, 2023). Namun demikian, banyak pelaku usaha di Bandar Lampung belum memahami manfaat jangka panjang dari praktik-praktik ramah lingkungan. Sebagian dari mereka fokus pada keuntungan cepat, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka Panjang. Tidak adanya sistem pengelolaan limbah terpadu untuk tambak ikan menyebabkan pencemaran perairan yang signifikan. Limbah pakan dan kotoran ikan terbuang langsung ke laut tanpa filtrasi, yang bertentangan dengan pendekatan sirkular yang dianjurkan dalam Blue Economy. Pendekatan ini seharusnya mendorong pemanfaatan kembali limbah untuk menjadi pakan alami atau pupuk organik.

Di sisi lain, konsep Blue Economy juga mendorong diversifikasi ekonomi laut. Namun wawancara menunjukkan bahwa mayoritas nelayan dan pembudidaya di Bandar Lampung hanya bergantung pada satu jenis komoditas (Misbah, 2025). Hal ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan musim. Diversifikasi seperti pengolahan hasil laut, ekowisata pesisir, dan penangkapan spesies bernilai tinggi masih sangat terbatas. Kelembagaan lokal yang mendukung ekonomi biru juga masih lemah. Tidak banyak koperasi atau asosiasi nelayan yang benar-benar aktif mengembangkan praktik berkelanjutan. Padahal, sinergi kelembagaan adalah kunci untuk membangun ekosistem Blue Economy yang kuat, sebagaimana ditekankan dalam laporan OECD tentang Blue Economy (OECD, 2025).

Program pelatihan untuk pelaku perikanan yang mengintegrasikan prinsip Blue Economy juga minim. Sebagian besar nelayan dan pembudidaya mengandalkan pengalaman turun-temurun dan kurang terpapar pada pelatihan berbasis sains kelautan dan manajemen lingkungan. Rendahnya literasi kelautan menjadi salah satu penghambat utama transformasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Aspek penting lain dari Blue Economy adalah perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan *mangrove*. Namun, di Bandar Lampung masih terjadi alih fungsi kawasan pesisir untuk pembangunan industri dan pemukiman, yang mengganggu keseimbangan ekologis. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang laut belum mendukung visi Blue Economy secara menyeluruh.

Penerapan zona konservasi laut juga masih minim. Kawasan konservasi yang ada belum terintegrasi dengan wilayah tangkap dan budidaya masyarakat, sehingga sering menimbulkan konflik. Padahal, integrasi zona lindung dalam wilayah ekonomi laut adalah salah satu prinsip Blue Economy untuk menjaga keberlanjutan sumber daya jangka panjang. Aspek pemantauan dan evaluasi lingkungan hidup juga belum menjadi prioritas dalam pengelolaan perikanan. Tidak ada data terkini yang dapat diakses publik tentang kualitas air laut, status stok ikan, atau pencemaran pesisir. Ketiadaan data ini menyulitkan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Blue Economy juga menekankan pentingnya peran riset dan pendidikan tinggi dalam membangun inovasi laut. Sayangnya, keterlibatan perguruan tinggi lokal dalam pengembangan teknologi budidaya atau model bisnis pesisir masih rendah. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha perlu diperkuat untuk mempercepat penerapan prinsip Blue Economy di lapangan. Kurangnya akses pendanaan untuk inovasi biru menjadi penghambat lain. Para pelaku usaha kecil kesulitan memperoleh pinjaman untuk mengganti alat tangkap ramah lingkungan atau membangun tambak yang lebih efisien. Program permodalan khusus Blue Economy masih belum tersedia secara luas di tingkat daerah. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketimpangan akses terhadap pasar. Pelaku kecil seringkali bergantung pada tengkulak yang membeli hasil tangkapan atau budidaya dengan harga rendah. Tanpa adanya sistem rantai pasok yang adil dan berkelanjutan, prinsip Blue Economy yang inklusif tidak akan tercapai. Pemerintah daerah sebenarnya telah menginisiasi beberapa program, namun pelaksanaannya masih terbatas. Beberapa program bantuan alat tangkap ramah lingkungan atau pelatihan budidaya belum menjangkau seluruh pelaku di wilayah pesisir. Perlu adanya pemetaan dan strategi implementasi yang lebih terarah dan menyeluruh.

Dalam konteks global, Blue Economy telah menjadi agenda utama dalam berbagai forum internasional seperti UN Ocean Conference dan World Ocean Summit (A, 2023). Kota Bandar Lampung memiliki peluang besar untuk mengadopsi agenda ini secara lokal sebagai bagian dari pembangunan pesisir berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya laut yang besar, penerapan Blue Economy di Bandar Lampung bisa menjadi model percontohan untuk daerah pesisir lainnya di Indonesia. Namun hal ini membutuhkan komitmen lintas sektor, reformasi kebijakan, dan kesadaran kolektif dari masyarakat pesisir sendiri.

Kesimpulannya, meskipun terdapat beberapa inisiatif awal, implementasi Blue Economy di kawasan pesisir Bandar Lampung masih berada pada tahap awal dan belum terstruktur. Dengan perencanaan yang baik dan dukungan kebijakan, kawasan ini berpotensi menjadi episentrum ekonomi biru berbasis kelestarian dan kesejahteraan.

Kendala dan Peluang dalam Penerapan Prinsip Blue economy pada Industri Perikanan di Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung

Penerapan prinsip Blue Economy pada industri perikanan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung menghadapi sejumlah kendala mendasar yang menghambat implementasi penuhnya. Tantangan utama adalah rendahnya pemahaman dan literasi kelautan di kalangan pelaku usaha perikanan, di mana mayoritas masih berorientasi pada hasil cepat dan pengetahuan turun-temurun, sehingga mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kendala ini diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap teknologi modern seperti *Recirculating Aquaculture System* (RAS) dan alat tangkap ramah lingkungan, yang seringkali memiliki biaya investasi awal yang tinggi. Selain itu, akses pembiayaan yang terbatas menjadi hambatan serius bagi nelayan dan pembudidaya kecil untuk beralih ke praktik berkelanjutan, sebab lembaga keuangan lokal belum memiliki skema pendanaan khusus ekonomi biru. Dari sisi lingkungan, praktik konversi lahan *mangrove* menjadi tambak dan buruknya pengelolaan limbah perikanan serta rumah tangga menyebabkan degradasi ekosistem pesisir dan penurunan kualitas air. Kelemahan kelembagaan lokal, di mana koperasi nelayan kurang aktif dalam inovasi lingkungan, serta konflik penggunaan ruang laut antara wilayah tangkap/budidaya dan zona konservasi, turut memperumit upaya mewujudkan ekonomi biru. Kelembagaan lokal yang solid, sebagaimana ditekankan oleh OECD (2025), merupakan fondasi utama pengembangan ekonomi laut berkelanjutan.

Di sisi lain, kawasan pesisir Bandar Lampung memiliki berbagai peluang strategis untuk mengakselerasi penerapan Blue Economy dan mendorong transformasi sektor perikanan. Potensi diversifikasi ekonomi sangat besar, dengan tumbuhnya inisiatif lokal dalam industri pengolahan hasil laut skala kecil (seperti abon, bakso, dan kerupuk) yang menambah nilai jual produk perikanan. Peluang signifikan lainnya adalah pengembangan ekowisata pesisir berbasis konservasi di wilayah dengan keanekaragaman hayati dan bentang alam yang indah, seperti Lempasing dan Puri Gading, yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dan riset di Lampung dapat menjadi motor penggerak inovasi

yang aplikatif, didorong oleh kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh terhadap isu perubahan iklim dan degradasi laut. Secara kelembagaan, kerangka hukum nasional seperti UU No. 1 Tahun 2014 memberikan dasar legal untuk tata kelola laut berkelanjutan, didukung oleh program pelatihan spesifik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait budidaya berkelanjutan yang dapat mempercepat transformasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, t.t.). Secara geografis, lokasi strategis di Selat Sunda menawarkan akses pasar yang luas dan memudahkan pembangunan logistik perikanan efisien. Penguatan sinergi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, termasuk melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ini dan menjadikan Bandar Lampung sebagai *pilot project* ekonomi biru nasional.

Kontribusi Industri Ikan Tangkap dan Budidaya Ikan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat Pesisir melalui Pendekatan Blue economy dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kontribusi industri ikan tangkap dan budidaya ikan di pesisir Kota Bandar Lampung terhadap pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan Blue Economy dilihat dari perspektif Ekonomi Islam terwujud nyata dalam internalisasi nilai-nilai etika, spiritualitas, dan keberlanjutan dalam praktik ekonomi nelayan sehari-hari. Blue Economy, yang menekankan pengelolaan sumber daya laut secara efisien, inklusif, dan ramah lingkungan (Pauli, 2010), secara fundamental sejalan dengan kerangka *Maqashid al-Syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*Hifdz al-Nafs*), harta (*Hifdz al-Mal*), dan dalam konteks kontemporer, lingkungan (*Hifdz al-Bi'ah*) sebagai bentuk tanggung jawab *khalifah* di bumi (Khuluq & Asmuni, 2024).

Kontribusi ini tercermin pada nelayan ikan tangkap, seperti Bapak Ramli, yang melakukan penangkapan secara selektif dan bertanggung jawab dengan menolak alat tangkap destruktif. Tindakan ini merupakan implementasi prinsip Mas'uliyah (tanggung jawab) dalam Islam, yang menekankan akuntabilitas ekologis manusia atas aktivitas ekonominya, selaras dengan amanah kekhalifahan yang disebutkan dalam QS. Al-Mulk:15 tentang pemanfaatan bumi dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula, praktik pembudidayaan ikan, seperti Bapak Manto, yang berbudidaya secara berkelanjutan tanpa bahan kimia dan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pakan alami (Manto, 2025), mencerminkan prinsip kejujuran (*shidq*) dan keberkahan, yang menjaga kesehatan konsumen (*Hifdz al-Nafs*) dan lingkungan (*Hifdz al-Bi'ah*).

Secara sosial dan ekonomi, kontribusi vital terlihat dari upaya nelayan untuk menegakkan al-'Adl (keadilan) dan al-Kifayah (kecukupan). Sikap nelayan yang menolak menjual hasil budidaya kepada tengkulak yang menekan harga dan memilih jalur distribusi melalui koperasi atau pasar lokal menunjukkan semangat untuk mencegah praktik eksploitatif, sesuai dengan prinsip Islam "La dharar wa la dhirar" (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah), dan penegasan keadilan dalam QS. Al-Maidah:8. Keadilan dalam transaksi ini memperkuat struktur ekonomi lokal dan menciptakan ketahanan ekonomi. Bahkan di kalangan nelayan muda, seperti Bapak Latif dan Bapak Rahman (Latif, 2025), nilai-nilai *ilahiyah* telah terinternalisasi, di mana bekerja dianggap sebagai bagian dari ibadah dan didasari niat untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Dengan demikian, integrasi antara Blue Economy dan Ekonomi Islam menawarkan model pembangunan pesisir yang tidak hanya berfokus pada efisiensi sumber daya dan teknologi (Pauli, 2010), tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa keberlanjutan sejati harus dilandasi etika, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep Blue Economy di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, seperti rendahnya literasi kelautan, keterbatasan akses teknologi ramah lingkungan, dan lemahnya kelembagaan lokal. Praktik perikanan konvensional yang belum berorientasi pada keberlanjutan, minimnya diversifikasi ekonomi, serta kurangnya integrasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Namun, terdapat peluang besar melalui potensi sumber daya laut yang melimpah, dukungan kebijakan nasional, dan inisiatif lokal dalam pengolahan hasil laut serta ekowisata pesisir. Integrasi prinsip Blue Economy dengan nilai-nilai ekonomi Islam terbukti mampu mendorong praktik perikanan yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan sampel yang relatif kecil dan fokus wilayah yang terbatas pada pesisir Kota Bandar Lampung, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, keterbatasan akses data primer dan teknologi di lapangan membatasi analisis terhadap inovasi-inovasi terbaru dalam ekonomi biru. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak partisipan, dan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dan lingkungan secara lebih komprehensif. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kelembagaan lokal, peningkatan

edukasi dan pelatihan berbasis teknologi, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung transformasi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan di kawasan pesisir Indonesia.

Referensi

1. Ahmad, S. (2025). Sinergi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Wawancara dengan penulis, 21 Maret 2025.
2. Aprilia, & Mulyanie, E. (2023). Implementasi konsep blue economy di Indonesia sebagai upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 14: Life below water. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, 7(2), 40–48. <https://doi.org/10.33059/jisa.v7i2.9116>
3. Chapra, M. U. (2021). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1zxsj7g>
4. Creswell, J. W. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506335193>
5. Emzir, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
6. Gideon, A., Lestari, N. T., Bano, V. O., et al. (2021). *Metode penelitian pendidikan*. Pradina Pustaka.
7. Hasan, Z. (2022). Sustainable development from an Islamic perspective: Meaning, implications and policy concerns. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 19(1), 3–18. <https://doi.org/10.4197/islec.19-1.1>
8. Howara, D. (2013). Strategi pengembangan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Donggala. *J. Agroland*, 17(3), 75–81.
9. Humairoh, T. L., Setyaningrum, I., & Tanaya, O. (2024). Keberlanjutan blue economy melalui kontribusi industri ikan tangkap dan budidaya ikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(2), 3443–3452. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8029>
10. Latif, R. (2025). Praktik ekonomi kelautan konvensional di pesisir Bandar Lampung. Wawancara dengan penulis, 18 Maret 2025.
11. Lestari, S., & Khoirudin, R. (2017). Analisis kelembagaan penerapan konsep blue economy pada tambak udang (Studi kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 198–210. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>
12. Mandeville, G. K., & Roscoe, J. T. (1971). Fundamental research statistics for the behavioral sciences. *Journal of the American Statistical Association*, 66(333), 224. <https://doi.org/10.2307/2284880>
13. Marzuki, A. (2025). Dampak limbah plastik dan pakan buatan dalam aktivitas budidaya ikan di Bandar Lampung. Wawancara dengan penulis, 20 Maret 2025.
14. Mukaromah, H., & Rahmawati, L. (2023). Implementasi blue economy di wilayah pesisir Kenjeran Surabaya. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(2), 101–114. <https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.101-114>
15. OECD. (2025). Promoting sustainable ocean economies: Guidance for development co-operation. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). <https://doi.org/10.1787/72055d7f-en>
16. Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2025). Keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam: Implikasi filosofis dan praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 134–143. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>
17. Pauli, G. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm Publications.
18. Permana, Y. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.30739/jesd.v5i2.1234>
19. Priyono, A. (2022). *Industri pariwisata bahari*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
20. Rahardjo, M. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pustaka Pelajar.
21. Roscoe, J. T. (2021). Fundamental research statistics for the behavioral sciences. *Journal of the American Statistical Association*, 66(333), 224. <https://doi.org/10.2307/2284880>
22. Septiana, D. (2024). Studi kasus dalam penelitian sosial: Pendekatan dan aplikasi. *Jurnal Penelitian Sosial*, 8(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/jps.v8i1.5678>
23. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
24. Sudaryono, A. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan*. Rajawali Pers.
25. Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Analisis kelembagaan penerapan konsep blue economy pada tambak udang (Studi kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 198–210. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>
26. Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
27. Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.